

BAB 6

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN

6.1.1. Perekonomian Daerah

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka perlu dirumuskan strategi pembangunan. Dalam merumuskan strategi pembangunan harus memenuhi kriteria yang mencakup hubungan rasional antara Visi dan Misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih. Kemudian memperlihatkan hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategis, pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun dan kemudian dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Secara umum, sasaran dari strategi kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2016 yang akan dirumuskan, dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berbasis keunggulan daerah, dengan memperhatikan prinsip ekonomi kerakyatan, sehingga dapat melibatkan secara aktif semua potensi yang ada pada masyarakat, dalam rangka pemerataan pembangunan melalui daya dukung infrastruktur dan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Dalam prosesnya nanti, hasil pembangunan dari strategi ini akan mendukung fokus pembangunan nasional yaitu *Pro-growth*, *Pro-poor*, *Pro-Job* serta *Pro-environment*.

2. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan (*growth pole*) guna memberi daya tumbuh pada daerah sekitarnya, terutama pada daerah pinggiran (*phery-phery area*). Sehingga diharapkan, proses pemerataan pembangunan antar daerah (kecamatan) akan berjalan dengan proses berlangsungannya synergisitas antar daerah. Strategi ini dilakukan dalam upaya mensiasati keterbatasan anggaran dalam memacu pembangunan pada semua daerah.
3. Pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan, dikembangkan aktivitas ekonomi, khususnya yang berorientasi agroindustri dan agribahari dengan berbasis pada kompetensi daerah bersangkutan. Hal ini dilakukan, bukan hanya dalam rangka pengembangan ekonomi sektoral tapi lebih jauh yaitu dalam rangka penciptaan nilai tambah melalui proses industrialisasi sektor pertanian dan perikanan, yang merupakan basis daerah.
4. Memperbaiki dan mengembangkan kelembagaan ekonomi pada tataran sentra produksi dalam upaya memperbaiki posisi petani dan meningkatkan pendapatan petani (NTP), melalui upaya memperpendek jalur tata niaga. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah. Ini berarti, BUMD akan berperan secara penuh dalam menjaga kestabilan harga produksi.
5. Memberi daya dukung dalam bidang permodalan dengan mengembangkan lebih lanjut institusi Badan Perkreditan Rakyat (BAPERA) atau membentuk Lembaga Keuangan Mikro. Dengan memberi dukungan pendanaan maka diharapkan dapat meningkatkan produksi dan memposisikan petani dalam berhadapan dengan pedagang.

Dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan tersebut maka strategi kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2016 dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian perkebunan, perikanan, perikanan dan kelautan perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya yang berbasis ekonomi kerakyatan

2. Pengembangan komoditas unggulan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan
3. Menciptakan kawasan sentra produksi yang berdaya saing
4. Pengembangan usaha agroindustri
5. Pengembangan kelembagaan tataniaga dengan melibatkan peranan BUMN
6. Pengembangan kelembagaan keuangan mikro

6.1.2. Bidang Sumberdaya Alam dan lingkungan

6.1.2.1. Migas dan Bahan Tambang

1. Pembangunan sektor Migas dan Bahan Tambang dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan dan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan.
2. Pengelolaan migas dan bahan tambang dilakukan dengan melibatkan BUMD dan masyarakat lokal sehingga manfaat dan hasil pengelolaan dapat dirasakan secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat.
3. Pengelolaan migas dan bahan tambang dilakukan dengan memperhatikan dan memperhitungkan kerusakan lingkungan dan fasilitas umum seperti infrastruktur sebagai bagian dari biaya produksi pengelolaan sumberdaya alam yang harus menjadi tanggung jawab pengelola.

6.1.2.2. Pembangunan pertanian

1. Menekankan pembangunan dibidang pertanian pada upaya untuk menjadikan sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.
2. Peningkatan produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk pertanian dan perikanan serta pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan.

3. Peningkatan efisiensi, modernisasi serta nilai tambah komoditi tanaman pangan terutama padi, perkebunan dan kelautan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan mengembangkan agri bahari yang dinamis dan efisiensi, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan. Perhatian perlu diberikan pada upaya-upaya pengembangan kemampuan masyarakat, pengentasan kemiskinan secara terarah dan terstruktur serta perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan yang tidak adil.
4. Pembangunan perikanan terutama perikanan laut dilaksanakan dengan mengoptimalkan keunggulan komperatif Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai wilayah pesisir pantai.
5. Peningkatan dan perluasan produksi, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan di daerah pantai, tambak dan air tawar serta usaha penangkapan ikan di daerah lepas pantai.
6. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dilakukan dengan berlandaskan azas kelestarian secara ekologi, ekonomi dan sosial dengan meminimalkan dampak dan kerusakan terhadap lingkungan

6.1.3. Infrastruktur Daerah

Untuk mewujudkan pengembangan sarana-prasarana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, digunakan beberapa pendekatan dan strategi yaitu:

1. Pengembangan sarana-prasarana seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik dan irigasi harus diorientasikan sesuai strategi pengembangan ekonomi wilayah serta menjamin kesejahteraan masyarakat umum;
2. Aksesibilitas ke dan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus terus dijamin dan ditingkatkan, tidak saja ke pusat ibukota Propinsi, tapi ke beberapa pusat perekonomian dan administrasi di wilayah yang lain. Pembangunan aksesibilitas ke seluruh wilayah perdesaan harus dilaksanakan dengan membangun jaringan transportasi darat dan atau infrastruktur transportasi sungai dan laut harus hingga ke

pedesaan.

3. Menekankan konsep agri bahari dalam pembangunan pedesaan, karena sebagian besar pedesaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah pedesaan berbasis pertanian dan kelautan.
4. Mengembangkan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan pedesaan dan kota-kota kecamatan dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan.
5. Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur pertanian dan perikanan untuk menunjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai sentra produksi komoditi tanaman pangan terutama padi dan perikanan.
6. Penyediaan sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar dan infrastruktur penunjang lain untuk meningkatkan aksesibilitas produsen dan konsumen terhadap pasar.
7. Meningkatkan akses informasi, pemasaran permodalan, kesempatan kerja dan teknologi bagi masyarakat pedesaan.

6.1.4. Kesehatan

1. Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada baik berupa fasilitas infrastruktur kesehatan, perbekalan kesehatan dan tenaga kesehatan seefektif mungkin bagi tercapainya pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat termasuk masyarakat tidak mampu dan masyarakat tinggal di wilayah terpencil.
2. Pembangunan kesehatan dilakukan dengan mengoptimalkan kemampuan layanan puskesmas dan satelitnya pada masing-masing kecamatan dan desa sehingga akan memperpendek jarak tempuh masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan.
3. Relatif masih tingginya angka kelahiran yang mendapat pertolongan dari dukun mengindikasikan tingginya peran tenaga non kesehatan dalam proses persalinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh

karena itu kerja sama dengan Bidan Desa dan Dokter Puskesmas harus lebih ditingkatkan.

6.1.5. Pendidikan

1. Peningkatan penataan sistem pelayanan pendidikan untuk mencapai kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat regional dan nasional.
2. Menyiapkan SDM yang terampil yang siap bekerja, untuk itu Balai Latihan Kerja (BLK) akan dilengkapi dengan sarana fasilitas pelatihan yang modern dan memadai.
3. Peningkatan kualitas lulusan siswa SMK, SMA, SMP/Sederajat dan SD/Sederajat.

6.2. ARAH KEBIJAKAN

6.2.1 Perekonomian Daerah

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih adalah menitik beratkan pada upaya **meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, perikanan dan kelautan perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya**. Dalam rangka percepatan pencapaiannya maka diperlukan adanya strategi daerah seperti yang disampaikan di atas, yang kemudian akan menjadi arah kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Adapun Kebijakan dan strategi pengembangan usaha ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, perikanan dan kelautan perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur , meliputi:

1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian perkebunan, perikanan, perikanan dan kelautan perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya yang berbasis ekonomi kerakyatan
 - a. Memaksimalkan potensi ilmuwan lokal yang ada di perguruan tinggi di Provinsi Jambi untuk melakukan riset dan menemukan teknologi tepat guna untuk pengembangan Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 - b. Memberikan Insentif kepada petani dengan cara memberikan secara berkelanjutan bantuan benih, bibit, sarana produksi dan teknologi tepat guna lainnya
 - c. Menyiapkan fasilitas pengendalian banjir dan tata air di daerah pertanian misalnya dengan menyediakan alat berat siap pakai untuk normalisasi parit
 - d. Mendorong investor untuk menunjang peningkatan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti Pembangunan pabrik kelapa sawit.
 - e. Memberikan bantuan 400 unit pompong setiap tahun dan peralatan tangkap lainnya atau berjumlah 2.000 unit untuk 5 tahun bagi masyarakat nelayan pesisir / miskin
 - f. Memberikan Kredit Modal Kerja setiap Desa Rp. 50.000.000,00 – Rp. 100.000.000,00 yang dikelola lembaga keuangan mikro di tiap desa untuk didistribusikan pada kelompok usaha produktif
 - g. Menggali dan mengembangkan wisata khas Kab. Tanjung Jabung Timur
 - h. Meningkatkan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri
 - i. Optimalisasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan jasa pelayanan pariwisata, terutama yang melibatkan lebih dari satu moda transportasi

- j. Peningkatan, pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah dengan peran serta pelaku usaha dan masyarakat
- 2. Pengembangan komoditas unggulan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan
 - a. Pengembangan satu komoditas pada satu kecamatan / kawasan desa
 - b. Peningkatan daya saing komoditas unggulan
 - c. Perluasan Aksesibilitas Pasar
- 3. Menciptakan kawasan sentra produksi yang berdaya saing
 - a. Mengembangkan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang dapat menggerakkan pertumbuhan wilayah-wilayah yang tertinggal
 - b. Meningkatkan pembangunan di kawasan sentra produksi agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya
- 4. Pengembangan usaha agroindustri
 - a. Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif
 - b. Mengembangkan UKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM
 - c. Mengembangkan UKM dengan pendekatan klaster pada sektor agribisnis dan agroindustri yang didukung adanya pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif

- d. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian di pedesaan melalui peningkatan kualitas dan kontinuitas suplai berbasis sumber daya local
 - e. Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif
5. Pengembangan kelembagaan tataniaga dengan melibatkan peranan BUMN
- a. Memantapkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), (transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas) dalam pengelolaan BUMD yang profesional
6. Pengembangan kelembagaan keuangan mikro
- a. Penataan dan Pengembangan kelembagaan keuangan mikro
 - b. Membuka aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan

Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada keunggulan daerah dengan memperhatikan prinsip ekonomi kerakyatan, tercermin dari tumbuh kembangnya sektor agroindustri yang berbasis komoditas unggulan daerah. Hal ini dicapai melalui keterlibatan secara aktif semua potensi yang ada pada masyarakat, dalam rangka pemerataan pembangunan melalui daya dukung infrastruktur yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan beberapa program yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan pangan serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Untuk mewujudkan kualitas SDM melalui pengembangan sistem pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki ketrampilan dan siap pakai dengan berorientasi pada kebutuhan pasar tenaga kerja.

3. Untuk memenuhi kualitas pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.
4. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi. Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien.
5. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan dan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai keagamaan.

Dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesungguhnya lebih menekankan pada sinergitas dari kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Jambi menjadi kebijakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengedepankan pada penanganan berdasarkan pada fungsi pelayanan umum. Selain itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2006 - 2026 disebutkan, salah satu misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkeadilan guna mewujudkan daya saing daerah terhadap perekonomian global.

Penyelenggaraan pembangunan diarahkan pada :

1. Menjaga keseimbangan pembangunan antara kawasan pesisir dengan daerah daratan dengan menyalurkan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan;
2. Pengembangan infrastruktur serta sarana prasarana yang diarahkan pada penciptaan sinergisitas antar kawasan, baik dari sisi sosial budaya maupun ekonomi;

3. Mengakselerasi pertumbuhan wilayah yang potensial untuk tumbuh, menjaga pertumbuhan pada kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan pertumbuhan wilayah dalam satuan ruang; dan
4. Mendorong pengembangan wilayah berdasarkan pertimbangan kompetensi keunggulan daerah, dengan tetap mempertimbangkan aspek satu kesatuan sistem yang bersinergisitas.
5. Pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik melalui upaya penyelenggaraan pelayanan public terpadu dalam rangka pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme secara berkesinambungan.

Adapun kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dituangkan dalam kajian spasial, meliputi:

1. **Pengurangan kesenjangan pembangunan antar kawasan, terutama antara kawasan daerah pesisir pantai dengan kawasan daratan, melalui:**
 - a. Pengembangan infrastruktur transportasi darat dan air dengan memperhatikan aspek interaksi antar kawasan. Pengembangan sarana prasarana transportasi yang akan dikembangkan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus dilakukan dengan mengacu pada studi kelayakan dan kajian dampak lingkungan sehingga pembangunannya tetap mampu menciptakan keseimbangan.
 - b. Peningkatan akses kawasan budi daya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer.
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berupa pengembangan fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKW dan PKL.

2. Pengembangan ekonomi berbasis agroindustri, agribahari dan industri hilir, melalui:

- a. Peningkatan kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
- b. Peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan dan agribahari dengan melengkapi fasilitas kelembagaan keuangan, kelembagaan produksi dan distribusi serta jasa pendukung komoditas pertanian dan perikanan kawasan lainnya.
- c. Pembukaan akses pasar untuk produk-produk yang dihasilkan agroindustri, agribahari atau industri hilir lainnya, baik pasar lokal maupun regional bahkan ekspor.
- d. Peningkatan dan pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis cepat tumbuh melalui pengembangan satu komoditas unggulan, satu pengusaha unggulan dan satu koperasi unggulan pada satu kawasan.

3. Optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, melalui:

- a. Pengembangan satu komoditas unggulan, satu pengusaha unggulan dan satu koperasi unggulan pada satu kawasan.
- b. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan dan perikanan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan.
- c. Pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.
- d. Pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.

4. Menjaga kawasan lindung untuk kelestarian sumberdaya alam secara terpadu, melalui:

- a. Pemantapan fungsi kawasan lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 40% dari luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur .
- c. Sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Tanjung Jabung Barat.

Arahan pengembangan wilayah untuk setiap kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang didasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada maka di arahkan sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Mendahara
- 2) Kecamatan Mendahara Ulu
- 3) Kecamatan Geragai
- 4) Kecamatan Dendang
- 5) Kecamatan Muara Sabak Timur
- 6) Kecamatan Muara Sabak Barat
- 7) Kecamatan Kuala Jambi
- 8) Kecamatan Rantau Rasau
- 9) Kecamatan Berbak
- 10)Kecamatan Nipah Panjang
- 11)Kecamatan Sadu

6.2.2. Sumberdaya Alam dan Lingkungan

6.2.2.1. Migas dan Bahan Tambang

1. Pengelolaan migas dan bahan tambang harus diarahkan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara lestari secara ekonomi, sosial dan ekologi.

2. Pembangunan dan pengelolaan migas dan bahan tambang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berada disekitar kawasan pengelolaan.
3. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana.
4. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup

6.2.2.2. Pertanian

Pembangunan bidang pertanian dan pemanfaatan sumberdaya alam diarahkan untuk menjamin pemenuhan kecukupan pangan dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan terutama petani tanaman pangan serta menjamin pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dan ramah lingkungan. Adapun arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan pertanian diarah pada pemanfaatan lahan berdasarkan potensi agronomis sehingga menjamin produktifitas lahan dan kepentingan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sehingga akan tercipta keseimbangan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi lahan dan kondisi fisik kawasan.
2. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan terutama pada ke fungsi penggunaan lain terutama pada kawasan yang secara agronomis sesuai untuk pengembangan komoditi pertanian tanaman pangan. Lahan yang secara agronomis cocok untuk budidaya tanaman pangan dapat ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan. Seperti yang diatur dalam UU No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan.
3. Selain dengan penetapan lahan pangan berkelanjutan, pengendalian ini juga dilakukan secara sinergis dengan memberikan bantuan fasilitas dan peralatan produksi pertanian, subsidi, kompensasi dan regulasi yang memihak petani tanaman pangan serta menjamin kelancaran

distribusi dan pemasaran sarana produksi pertanian dan hasil-hasil pertanian.

4. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani terutama petani tanaman pangan maka pembangunan pertanian juga diarahkan pada pertanian berbasis multi usaha yaitu pertanian yang dikombinasikan dengan usaha peternakan, perikanan dan perkebunan dalam satu unit rumah tangga tani..
5. Peningkatan produksi perikanan dilakukan dengan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam penangkapan ikan laut dan penerapan teknologi tepat guna dalam budidaya perikanan darat.
6. Penguatan kemampuan teknis budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, peningkatan kemampuan manajerial dan penguatan daya saing serta posisi tawar petani, peternak dan nelayan dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan yang melibatkan multipihak secara sistematis dan terencana.
7. Penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial petani, peternak dan nelayan dilakukan melalui peningkatan kemampuan berorganisasi secara partisipatif. Penguatan kelembagaan ekonomi termasuk pada lembaga keuangan desa sehingga mampu membantu petani, peternak dan nelayan dalam penyediaan modal usaha tani, ternak dan ikan.
8. Peningkatan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan nelayan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang mudah diaplikasikan.
9. Penyempurnaan sistem penyediaan dan distribusi pangan secara merata dengan harga terjangkau
10. Peningkatan kemampuan petani dan nelayan serta penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan.

11. Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat dan Peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan
12. Pembangunan sektor kehutanan diarahkan pada pengelolaan ekosistem hutan secara lestari dengan menerapkan pola pengelolaan berbasis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
13. Pemanfaatan hutan lebih diarahkan pada pengembangan ekowisata dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu termasuk nilai hutan berdasarkan kemampuan penyerapan dan penyimpanan karbon dalam skema perdagangan karbon internasional baik pada kawasan hutan produksi, konservasi dan hutan lindung.
14. Perlindungan dan peningkatan kualitas sumberdaya hutan alam terutama di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung sebagai salah satu penyangga kehidupan.
15. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya.
16. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dengan selalu memperhatikan aspek lingkungan hidup dan meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil di perdesaan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.

6.2.3. Infrastruktur Daerah

Arah kebijakan pembangunan Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Timur menitik beratkan pada upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yaitu transportasi, energi, air bersih, komunikasi, dan pertanian. Adapun arah kebijakan pembangunan bidang infrastruktur adalah

1. Infrastruktur Transportasi

- a. Meningkatkan akses antara pusat-pusat permukiman dengan pusat perekonomian dan produksi serta meningkatkan akses ke desa/wilayah potensial dan sentra produksi

- b. Pengembangan sistem prasarana transportasi terpadu, prasarana transportasi yang akan dikembangkan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan kecamatan dan desa-desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- c. Meningkatkan akses ke desa/wilayah potensial dan sentra produksi yang masih terisolir dan meningkatkan akses ke pasar
- d. Tersedianya infrastruktur pedesaan melalui pendekatan kewilayahan dalam rangka percepatan pembangunan desa tertinggal
- e. Pengembanagan prasarana transportasi yang akan mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditunjang dengan sistem prasarana transportasi darat dan sungai.
- f. Pengembangan transportasi air (laut dan sungai) dengan memfokuskan pada pengembangan kapasitas pelabuhan dan dermaga serta pemeliharaan alur sungai.
- g. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu : penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, fasilitas dan rambu jalan dan rambu sungai, penegakan hukum dan disiplin di jalan.
- h. Mensinergiskan sistem infrastruktur dengan konsep tata ruang wilayah.

2. Infrastruktur energi

- a. Pengembangan Energi Menciptakan alternatif dari Potensi setempat dan Mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan.
- b. Pemulihan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta kehandalannya terutama di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan perdesaan.
- c. Peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumberdaya energi

3. Jaringan irigasi dan kebutuhan air bersih yang merata

- a. Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan.
- b. Pendayagunaan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga
- c. Penyelenggaraan Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berbasis partisipasi masyarakat.
- d. Penataan system irigasi dalam mendukung peningkatan pemanfaatan lahan dan produksi pertanian
- e. Meningkatkan upaya pengendalian kecenderungan alih fungsi lahan, dengan mengoptimalkan sistem jaringan irigasi yang telah ada dan yang akan dibangun

6.2.4. Kesehatan

- 1. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan seluruh lapisan masyarakat Tanjung Jabung Timur termasuk masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat yang tinggal di wilayah/daerah terpencil.
- 2. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan daya jangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

6.2.5. Pendidikan

- 1. Meningkatkan kualitas pendidikan gratis untuk tingkat SD/Sederajat dan SMP/Sederajat, SMU/Sederajat
- 2. Meningkatkan pengaturan dalam bentuk perda tentang Sistem Pelayanan Pendidikan gratis bagi SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMU/ sederajat.
- 3. Meningkatkan kualitas lulusan dengan cara pemberian beasiswa untuk siswa SMU/ sederajat yang berprestasi namun tidak mampu secara ekonomi.

4. Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat miskin, daerah terpencil/ konflik, penyandang cacat untuk mengikuti pendidikan.
5. Pemberian beasiswa berkelanjutan untuk keluarga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1, Strata 2 dan Strata 3.
6. Menyiapkan tenaga professional yang berasal dari Tanjabtim untuk pendidikan Diploma III Perikanan dan Program Diploma yang terkait langsung dengan pengembangan ekonomi pedesaan dan kerakyatan.
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas pelatihan modern di BLK.
8. Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat penyandang cacat untuk mengikuti khursus di BLK.
9. Pendirian perguruan tinggi bidang ilmu yang relevan dengan potensi di Tanjung Jabung Timur.
10. Penempatan lokasi dan bidang praktek kerja siswa SMK ke tempat-tempat yang mendukung peningkatan kualitas lulusan.

Sebagai tindak lanjut dalam mengimplentasikan grand strategi dan arah kebijakan umum, dirumuskan strategi dan arah kebijakan implementasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) tahun. Adapun Strategi dan arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 berdasarkan pada tujuan, sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Matrik Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Tanjungjabung Timur tahun 2011 – 2016

VISI : MENUJU TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA, ADIL , MANDIRI, UNGGUL, DEMOKRATIS DAN AGAMIS (SAMUDRA)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI I : Mempercepat Ketersediaan Infrastruktur Umum Secara Merata dan Berkeadilan			
Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian masyarakat hingga wilayah terpencil	1. Penuntasan perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Propinsi	1. Pengembangan sarana-prasarana diorientasikan sesuai strategi pengembangan ekonomi wilayah serta menjamin kesejahteraan masyarakat umum	1. Meningkatkan akses antara pusat-pusat permukiman dengan pusat perekonomian dan produksi serta meningkatkan akses ke desa/wilayah potensial dan sentra produksi
			2. Pengembangan sistem prasarana transportasi terpadu, prasarana transportasi yang akan dikembangkan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan kecamatan dan desa-desa
			3. Meningkatkan akses ke desa/wilayah potensial dan sentra produksi yang masih terisolir dan meningkatkan akses ke pasar

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		2. Aksesibilitas ke dan dari kabupaten Tanjung Jabung Timur harus terus dijamin dan ditingkatkan, tidak saja ke pusat ibukota Propinsi, tapi ke beberapa pusat perekonomian dan administrasi di wilayah yang lain	1. Tersedianya infrastruktur pedesaan melalui pendekatan kewilayahan dalam rangka percepatan pembangunan desa tertinggal
			2. Pengembanaan prasarana transportasi yang akan mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditunjang dengan sistem prasarana transportasi darat dan sungai
			3. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu: penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, fasilitas dan rambu jalan, penegakan hukum dan disiplin di jalan
		3. Menekankan konsep agri bahari dalam pembangunan pedesaan	1. Pengembangan transportasi air (laut dan sungai) dengan memfokuskan pada pengembangan kapasitas pelabuhan serta pemeliharaan alur sungai.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		4. Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur pertanian dan perikanan	1. Pengembangan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, poergudangan dan pengolahan hasil pertanian
			2. Pengembangan infrastruktur perikanan seperti fasilitas pelelangan ikan, pengolahan hasil perikanan dan pergudangan
	2. Terwujudnya perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa.	1. Menyediakan dan meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan listrik.	1. Pengembangan Energi Menciptakan alternatif dari Potensi setempat dan Mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan
			2. Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta keandalannya terutama di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan perdesaan
		2. Pemenuhan kebutuhan air bersih yang merata	1. Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan
			2. Pendayagunaan sumberdaya air sebagai pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	3. Penyelesaian pembangunan tanggul terutama di kawasan pertanian masyarakat	1. Menyediakan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian terutama tanaman pangan.	1. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur irigasi dengan menggunakan alat berat
	4. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi yang menghubungkan Delta Berbak (Muara Sabak - Rantau Rasau - Berbak - Nipah Panjang - Sadu)	1. Percepatan pembangunan jembatan yang menghubungkan Delta Berbak hingga Kawasan Ujung Jabung melalui <i>conccurent strategy</i> antara pemerintah pusat - provinsi - kabupaten	1. Membangun komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan provinsi dengan <i>inter-governmental networking policy</i>
	5. Adanya dukungan pembangunan jaringan telekomunikasi dan listrik	1. Menyediakan dan meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi bagi seluruh lapisan masyarakat	1. Pengembangan Energi Menciptakan alternatif dari Potensi setempat dan Mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan
			2. Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta keandalannya terutama di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan perdesaan
	6. Menunjang pengembangan Kawasan Ujung Jabung sebagai Kawasan Ekonomi Strategis Provinsi Jambi.	1. Memfasilitasi penyiapan lokasi sebagai kawasan ekonomi strategis	1. Menyempurnakan dan menyederhanakan pemberian izin usaha melalui sistem satu pintu.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2. Memfasilitasi investor dalam kemudahan berusaha dan pembebasan lahan
			1. Menyusun master plan pendukung pengembangan Kawasan Ujung Jabung yang terintegrasi meliputi infrastruktur jalan dan jembatan menuju kawasan.
			2. Pengembangan Wilayah Pertumbuhan
	7. Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu.	1. Menciptakan kualitas dan kuantitas kebutuhan umum perumahan dan pemukiman.	1. Pemenuhan dan peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman melalui bedah rumah
			2. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan, desa dan pesisir
			3. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			4. Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dengan Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Terampil dan Siap Pakai (Pendidikan Gratis Berkualitas)			
Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi	1. Peningkatan kualitas pendidikan (Perda Pendidikan Gratis Berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik)	1. Peningkatan penataan sistem pelayanan pendidikan untuk mencapai kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat regional dan nasional	1. Meningkatkan kualitas pendidikan gratis untuk tingkat SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMU/ sederajat 2. Meningkatkan pengaturan dalam bentuk perda tentang Sistem Pelayanan Pendidikan gratis bagi SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMU/ sederajat 3. Meningkatkan kualitas lulusan dengan cara pemberian beasiswa untuk siswa SMU/ sederajat yang berprestasi namun tidak mampu secara ekonomi 5. Pendirian perguruan tinggi bidang ilmu yang relevan dengan potensi di Tanjung Jabung Timur 6. Menyiapkan tenaga professional yang berasal dari Tanjabtim untuk pendidikan Diploma III Perikanan dan Diploma lainnya 7. Pemberian beasiswa berkelanjutan untuk keluarga tidak mampu namun berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1, Strata 2 dan Strata 3

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2. Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja	1. Menyiapkan SDM yang terampil yang siap bekerja, untuk itu Balai Latihan Kerja (BLK) akan dilengkapi dengan sarana fasilitas pelatihan yang modern dan memadai.	8. Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat miskin, daerah terpencil/ konflik, penyandang cacat untuk mengikuti pendidikan
			1. Peningkatan kualitas fasilitas pelatihan modern dan instruktur yang berkualitas di BLK
			2. Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat penyandang cacat untuk mengikuti khursus di BLK

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI III : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel dengan Penempatan SDM Profesional.			
Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif.	1. Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	1. Restrukturisasi organisasi yang berorientasi pada pencapaian visi - misi daerah	1. Melakukan evaluasi struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
	2. Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis <i>e-budget</i> dan <i>e-audit</i>	1. Implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis <i>e-budget</i> dan <i>e-audit</i>	1. Penyempurnaan secara terus menerus implementasi <i>e-budget</i> dan <i>e-audit</i>
			2. Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan anggaran berbasis <i>e-budget</i> dan <i>e-audit</i> .
	3. Penataan wilayah Kecamatan dan desa/kelurahan	1. Penataan kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan potensi dan kemampuan	1. Penataan kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan wilayah sangat terpencil, terpencil dan tidak terpencil.
		2. Peningkatan pelayanan terpadu kecamatan	1. Menetapkan kecamatan berbasis pelayanan terpadu melalui peraturan kepala daerah
	4. Penyiapan sistem perekrutan CPNS yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Tanjung Jabung Timur.	1. Penerimaan CPNS berdasarkan kompetensi dan kebutuhan daerah	1. Penerimaan CPNS dengan memprioritaskan calon yang berasal dan berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
		2. Melakukan evaluasi kebutuhan berdasarkan beban kerja untuk mengetahui formasi CPNS setiap tahun	1. Formasi CPNS sesuai dengan beban kerja setiap SKPD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		3. Pelaksanaan rekrutmen CPNS yang didasarkan pada kebutuhan beban kerja dan bebas KKN	1. Sistem recruitment CPNS yang bebas KKN
	5. Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	1. Peningkatan Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) untuk meningkatkan kinerja pegawai daerah, insentif guru PNS dan Non PNS, Honorer Daerah dan pejabat pemerintahan sampai ke tingkat RT)	1. TKD diberikan sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja serta lokasi tempat tugas (sangat terpencil - terpencil - tidak terpencil)
		2. Peningkatan insentif untuk guru PNS dan Non PNS daerah terpencil	1. Insentif Guru ditingkatkan sesuai dengan kemampuan daerah
	6. Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji).	1. Pemberian insentif untuk pegawai SARA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	1. Pemberian insentif bagi pegawai SARA di setiap desa/kelurahan
		2. Pemberian penghargaan kepada pegawai SARA teladan	1. Pemberian penghargaan bagi pegawai SARA teladan di setiap desa/kelurahan
	7. Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN	1. Pembentukan Perda tentang pelayanan publik	1. Perda pelayanan public mampu meningkatkan kepastian hukum dan pendapatan asli daerah
		2. Penguatan lembaga pelayanan terpadu satu pintu/Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)	1. KPPT berfungsi sebagai lembaga terpadu pelayanan publik
			2. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui pelayanan terpadu
		3. Membangun sistem komputerisasi e-KTP	1. Sistem komputerisasi KTP terbangun di Kabupaten

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		4. Pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	1. Pengembangan <i>e-Government</i>
		5. Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan public	1. Pelayanan publik bebas dari KKN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI IV : Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Perdagangan, Pariwisata dan Sektor Jasa Lainnya			
Mewujudkan roda perekonomian masyarakat dan struktur ekonomi yang kokoh yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi.	1. Menciptakan kondusifitas iklim investasi dan pendapatan daerah serta ekonomi daerah yang lebih baik	1. Penyederhanaan prosedur, perijinan yang menghambat kelancaran arus barang dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan dan pasar domestik
			2. Mengintegrasikan pengembangan usaha sesuai dengan karakteristik daerah dan pengusaha serta potensi usaha di setiap daerah lingkup Kabupaten Tanjab Timur
	2. Stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan.	1. Tercapainya kondisi makro ekonomi yang stabil dengan peningkatan sektor ekonomi secara merata	1. Menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi
			2. Menjaga stabilitas perekonomian daerah yang dasari oleh capaian indikator ekonomi
			3. Menciptakan inovasi baru dalam rangka memperkuat struktur perekonomian daerah dengan berbasis pada agro industri dan agribisnis dengan mengedepankan IPTEK

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	3. Membentuk BUMD yang dapat memberikan sumbangan kepada pendapatan asli daerah	1. Operasionalisasi dan permodalan BUMD dengan mitra strategis	1. Memantapkan penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), (transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas) dalam pengelolaan BUMD
			2. Penguatan LKMP melalui bantuan kredit modal kerja
	4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan akses kebutuhan dasar masyarakat.	1. Menciptakan Pemenuhan Kecukupan pangan daerah	1. Penyempurnaan sistem penyediaan dan distribusi pangan secara merata dengan harga terjangkau
			2. Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan
			3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat
			4. Peningkatan sistem kewaspadaan dini gizi dan pangan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		2. Meningkatnya produktivitas usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas	1. Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi
			2. Mengembang-kan UKM dengan pendekatan klaster pada sektor agribisnis dan agroindustri yang didukung adanya pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif
			3. Mengembang-kan UKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM
			4. Meningkatkan sistem dan strategi dalam menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
			5. Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			6. Memperluas akses masyarakat, terhadap sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha
			7. Pengembangan Koperasi yang handal
			8. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian di perdesaan melalui peningkatan kualitas dan kontinuitas suplai berbasis sumber daya local
	5. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.	1. Terselenggaranya upaya-upaya untuk penurunan tingkat pengangguran	1. Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi
			2. Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, out-sourcing, pengupahan, PHK serta jaminan keselamatan kerja
			3. Meningkatkan kualitas SDM ketenagakerjaan melalui pembekalan teknis dan peningkatan wawasan kerja
	6. Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui promosi	1. Menjadikan kepariwisataan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah	1. Meningkatkan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2. Optimalisasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan jasa pelayanan pariwisata, terutama yang melibatkan lebih dari satu moda transportasi
			3. Peningkatan, pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah dengan peran serta pelaku usaha dan masyarakat
	7. Peningkatan produksi pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) dan terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga	1. Menjadikan sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.	1. Pembangunan pertanian diarah pada pemanfaatan lahan berdasarkan potensi agronomis sehingga menjamin produktifitas lahan dan kepentingan strategis
			2. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan terutama pada ke fungsi penggunaan lain terutama pada kawasan yang secara agronomis sesuai untuk pengembangan komoditi pertanian tanaman pangan
			3. Memberikan bantuan fasilitas dan peralatan produksi pertanian, permodalan, subsidi, kompensasi dan regulasi yang memihak petani tanaman pangan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			4. Penyempurnaan sistem penyediaan dan distribusi pangan secara merata dengan harga terjangkau
		2. Peningkatan produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, penerapan teknologi tepat guna.	1. 1. Penguatan kemampuan teknis budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, peningkatan kemampuan manajerial dan penguatan daya saing serta posisi tawar petani
		3. Peningkatan efisiensi, daya saing modernisasi serta nilai tambah komoditi tanaman pangan terutama padi, perkebunan dan kelautan	1. Penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial petani, peternak dan nelayan dilakukan melalui peningkatan kemampuan berorganisasi secara partisipatif. Penguatan kelembagaan ekonomi
			2. Peningkatan nilai tambah produk pertanian, perkebunan peternakan dan perikanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
		4. Peningkatan dan perluasan produksi, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan di daerah pantai, tambak dan air tawar serta usaha penangkapan ikan di daerah lepas pantai	1. Peningkatan produksi perikanan dilakukan dengan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam penangkapan ikan laut
			2. Peningkatan produksi perikanan melalui penerapan teknologi tepat guna dalam budidaya perikanan darat.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			3. Peningkatan sarana dan prasarana nelayan melalui pemberian bantuan pompong dan perlengkapan alat tangkap
	8. Pengelolaan sumberdaya alam migas dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk Pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal	1. Pembangunan sektor Migas dan Bahan Tambang dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan dan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan	1. Pengelolaan migas dan bahan tambang harus diarahkan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara lestari secara ekonomi, sosial dan ekologi
		2. Pengelolaan migas dan bahan tambang dilakukan dengan melibatkan masyarakat	1. Pembangunan dan pengelolaan migas dan bahan tambang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berada disekitar kawasan pengelolaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		3. Pengelolaan migas dan bahan tambang dilakukan dengan memperhatikan dan memperhitungkan kerusakan lingkungan dan fasilitas umum seperti infrastruktur sebagai bagian dari biaya produksi pengelolaan	1. Membuat kebijakan yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhitungkan dampak-dampak terhadap lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung
			2. Membangun kesadaran semua pengelola sumberdaya alam migas dan bahan tambang akan dampak yang bisa timbul dari kegiatan eksploitasi dan transportasi hasil pengelolaan.
		4. Pengelolaan lingkungan dilakukan secara bijaksana untuk meminimalkan dampak lingkungan dan bencana alam	1. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana
			2. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	9. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	1. Menciptakan pusat pertumbuhan wilayah yang berdaya saing	1. Mengembang-kan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang dapat menggerakkan pertumbuhan wilayah-wilayah yang tertinggal
			2. Meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI V : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat			
Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sehat, produktif dan berdaya saing	1. Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau serta berkualitas	1. Menyediakan dan meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan	1. Memenuhi kebutuhan infratraktur kesehatan terutama untuk perdesaan dan wilayah terpencil
			2. Memenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat
	2. Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap	1. Menyediakan dan meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.	1. Memenuhi rasio tenaga kesehatan yang memadai sehingga mampu memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat dan wilayah.
		2. Meningkatkan distribusi tenaga kesehatan terutama untuk perdesaan dan wilayah terpencil	1. Pemerataan distribusi tenaga kesehatan dilakukan secara simultan terutama memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di perdesaan dan wilayah terpencil
	3. Ketersediaan peralatan, obat-obatan dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas dan satelitnya.	1. Pendayagunaan sumberdaya yang ada baik berupa fasilitas infrastruktur kesehatan, perbekalan kesehatan dan tenaga kesehatan yang efektif	1. Pendayagunaan kemampuan layanan puskesmas dan puskesmas pembantu pada masing-masing kecamatan dan desa
	4. Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak	1. Pemberiaan pelayanan yang maksimal bagi keluarga untuk menjadi Keluarga andalan	1. Pembinaan masyarakat pada progarmkeluarga berencana
			2. Pelayanan Kontrasepsi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			3. Pemberian jaminan kesehatan kepada keluarga miskin
		2. Pendampingan dan Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak	1. Pendampingan pelayanan kesehatan keluarga dan anak
			2. Perlindungan bagi Perempuan dan Anak

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI VI : Memfasilitasi Percepatan Penyelesaian Sengketa Lahan Masyarakat				
Menyelesaikan permasalahan sengketa lahan dengan prinsip saling menguntungkan antar pihak yang bersengketa dilandasi semangat kekeluargaan dan persaudaraan.	1.	Kepemilikan lahan-lahan yang mengalami sengketa terutama sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.	1. Pemetaan sengketa lahan yang melibatkan pengusaha dan masyarakat	1. Kejelasan posisi para pihak dalam sengketa lahan
				2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan
	2.	Melindungi fasilitas umum dan asset negara yang diakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi.	1. Fasilitasi penyelesaian sengketa lahan secara musyawarah dan damai	1. Terbentuknya lembaga penyelesaian sengketa lahan
				2. Terbentuknya kesepakatan bersama tentang mekanisme dan tata cara

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI VII : Meningkatkan Penataan Zonasi dan Perlindungan Terhadap Kawasan Konservasi, Peninggalan Budaya Situs dan Pengembangan Budaya Tradisional.			
Mewujudkan penataan zona dan melestarikan kawasan perlindungan situs budaya tradisional sebagai pusat penelitian budaya, wisata budaya dan warisan budaya.	1. Terciptanya kesadaran para stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan kawasan perlindungan.	1. Penyampaian informasi dan pemberian pemahaman para pihak tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi, peninggalan situs budaya dan pengembangan budaya tradisional	1. Terciptanya penataan sistem informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya dan pengembangan budaya tradisional
			2. Pemetaan zonasi kawasan konservasi
			3. Tindakan tegas terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kawasan konservasi dan kawasan perlindungan
	2. Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup.	1. Fasilitasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	1. Meningkatkan sikap dan tindakan positif para pihak untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup setiap tahun
	3. Adanya penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup.	1. Memotivasi masyarakat untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	1. Meningkatnya motivasi para pihak untuk menjaga lingkungan
		2. Menindak setiap pelaku yang merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	1. Meningkatnya sikap tegas pemerintah daerah untuk penerapan sanksi kepada pelaku kerusakan lingkungan hidup

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI VIII : Mewujudkan Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya yang Dinamis serta Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kehidupan Demokrasi			
Menciptakan keselarasan, kedamaian, ketentraman dan jalinan persaudaraan antar umat beragama, antar suku, antar golongan masyarakat	1. Perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam.	1. Penyiapan bantuan sosial bagi masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam pada kondisi tanggap darurat dan pasca bencana	1. Pemberian santunan bagi masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam pada kondisi tanggap darurat dan pasca bencana
	2. Dukungan terhadap kehidupan beragama sampai ditingkat terbawah	1. Adanya sosialisasi dan pembinaan kerukunan beragama secara berkelanjutan sampai ke tingkat RT.	1. Sosialisasi dan pembinaan kerukunan beragama secara berkelanjutan sampai ke tingkat RT oleh aparat yang berwenang dengan melibatkan tokoh masyarakat.
		2. Peningkatan dan pembinaan generasi muda bidang keagamaan	1. Pembinaan generasi muda melalui lembaga keagamaan
	3. Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku	1. Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku budaya yang ada di daerah	1. Pelestarian kesenian tradisional
			2. Terwujudnya pengembangan wisata bahari dan wisata religi
	4. Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial	1. Adanya fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial	1. Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan
			2. Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengurus utama gender dan anak, peningkatan partisipasi masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	5. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis.	1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penyampaian aspirasi secara demokratis	1. Penyiapan media penyaluran aspirasi masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi.
	6. Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar melalui institusi dan lembaga sosial secara transparan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
			2. Meningkatkan kualitas manajemen dan sumberdaya manusia pelayanan kesejahteraan sosial
			3. Mengembang-kan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial
			4. Meningkatnya mutu manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI IX : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olah Raga di Setiap Kecamatan dan Pembinaan Atlit Untuk Berprestasi			
Tersedianya sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlit untuk berprestasi sebagai media menjalin persaudaraan, persatuan dan kesatuan	1. Ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan.	1. Meningkatnya ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.	1. Pengembangan fasilitas olah raga berkualitas di setiap kecamatan
	2. Penyiapan atlit berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan	1. Adanya pembinaan atlit sejak dini, berkala dan berkelanjutan	1. Pembinaan generasi muda sejak dini untuk menjadi atlit sesuai dengan minat dan bakat
	3. Penghargaan bagi atlit daerah yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah.	1. Pemberian penghargaan bagi atlit daerah yang berprestasi.	1. Penyiapan anggaran bagi atlit daerah yang berprestasi sesuai dengan keuangan daerah
	4. Pengembangan dan pendidikan pemuda/I Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah tingkat provinsi dan tingkat nasional	1. Memfasilitasi pengembangan dan pendidikan pemuda/I Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah berprestasi di tingkat provinsi dan tingkat nasional	1. Pembinaan pemuda/I Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah berprestasi di tingkat provinsi dan tingkat nasional